



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

NOMOR 32 TAHUN 2014

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan efisiensi pelaksanaan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dipandang perlu menetapkan standar operasional prosedur;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pertimbangan obyektif untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan penyusunan anggaran belanja daerah, maka diperlukan suatu standar baku untuk mengatur tentang mekanisme dan tahapan dalam penyusunan anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2014 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 53);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal I**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan;
4. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah adalah Organisasi Pemerintah Daerah yang dibentuk dan bertugas untuk melakukan Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
8. Badan Anggaran adalah Badan yang dibentuk melalui mekanisme pada DPRD yang bertugas untuk melakukan Evaluasi, Pengendalian dan Penetapan Usulan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
10. Standard Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan;

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Maksud Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

## Tujuan Pasal 3

- (1) Sebagai pedoman bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi dan Pengendalian Anggaran yang lebih Efektif, Efisien dan Tepat Waktu sesuai dengan Tahapan Penyusunan Anggaran.
- (2) Menciptakan komitmen mengenai prosedur yang dikerjakan oleh satuan unit kerja instansi pemerintah dalam mewujudkan *good governance*.

## BAB IV KELUARAN/OUTPUT Pasal 4

- (1) Penyusunan Anggaran yang lebih efektif dan efisien serta tepat waktu yang sesuai dengan tahapan penyusunan anggaran berdasarkan pada Peraturan yang berlaku.
- (2) Peningkatan kualitas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sehingga dapat menghasilkan anggaran yang lebih baik.

BAB V  
BAGAN (FLOW CART)  
Pasal 5

Bagan (Flow Cart) Standar Operasional Prosedur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki  
pada tanggal 2 Juni 2014

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

  
HERSON MAYULU


Diundangkan di Bolaang Uki  
pada tanggal 2 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

  
TAHLIS GALLANG

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2014  
NOMOR 32

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
 NOMOR 32 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
 BELANJA DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN  
 BOLAANG MONGONDOW SELATAN.

  <b>KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN</b>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Nomor SOP</td> <td style="width: 40%;">: 090/ /BMS/V/2014</td> </tr> <tr> <td>Tgl Pembuatan</td> <td>: 6 Mei 2014</td> </tr> <tr> <td>Tgl Revisi</td> <td>:</td> </tr> <tr> <td>Tgl Pengesahan</td> <td>:</td> </tr> <tr> <td>Disahkan Oleh</td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">                 Bupati Bolaang Mongondow Selatan   <b><u>HERSON MAYULU</u></b> </td> </tr> <tr> <td>Nama SOP</td> <td>: Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah</td> </tr> </table>	Nomor SOP	: 090/ /BMS/V/2014	Tgl Pembuatan	: 6 Mei 2014	Tgl Revisi	:	Tgl Pengesahan	:	Disahkan Oleh	Bupati Bolaang Mongondow Selatan  <b><u>HERSON MAYULU</u></b>	Nama SOP	: Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Nomor SOP	: 090/ /BMS/V/2014												
Tgl Pembuatan	: 6 Mei 2014												
Tgl Revisi	:												
Tgl Pengesahan	:												
Disahkan Oleh	Bupati Bolaang Mongondow Selatan  <b><u>HERSON MAYULU</u></b>												
Nama SOP	: Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah												
<b>Dasar Hukum :</b> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014	<b>Kualifikasi Pelaksanaan :</b> 1. Pedoman Penyusunan, Evaluasi dan Pengendalian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah; 2. Dapat menciptakan komitmen terhadap prosedur dalam penyusunan anggaran; 3. Memberikan gambaran yang terstruktur dalam penyusunan anggaran.												
<b>Keterkaitan :</b> 1. Bupati; 2. Wakil Bupati; 3. Sekretaris Daerah; 4. Asisten; 5. Kepala Dinas; 6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah;	<b>Peralatan/Perlengkapan :</b> 1. Surat/Lembar disposisi pimpinan; 2. Komputer/Laptop; 3. Kertas;												

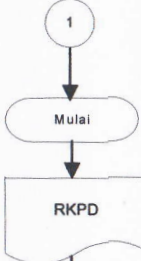
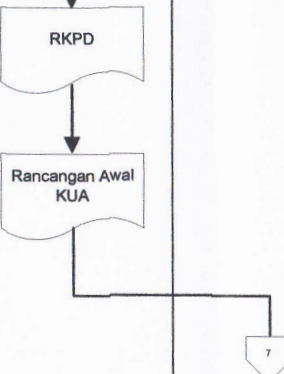
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 8. Badan Anggaran DPRD;	
<b>Peringatan :</b> Apabila tidak ditetapkan tahapan penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah akan mengakibatkan penyusunan anggaran yang sering tidak tepat waktu dan mempengaruhi kualitas anggaran yang dihasilkan.	<b>Pencatatan :</b> Dokumen Rancancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah setelah dievaluasi dan ditetapkan dicatat dalam lembaran daerah dan diarsipkan pada Dinas PPKAD.

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

HERSON MAYULU

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
 NOMOR 32 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN ANGGARAN  
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
 SELATAN.

BAGAN ALUR FLOW CHART

NO	KEGIATAN	SKPD	DPPKAD/PPKD	TAPD	SEKDA	KDH	DPRD	Gubernur	Mutu Baku		
									Kelengkapan Dokumen Hasil Musrembang	Waktu Akhir Bulan Mei	Output Dokumen RKPD
1	TAPD menyusun RKPD										
2	TAPD menyusun rancangan awal KUA. Rancangan Awal KUA tersebut memuat: - Pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan Pusat-Daerah - Prinsip dan kebijakan penyusunan APBD - Teknis penyusunan APBD Hal-hal khusus lainnya										

4

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 32 TAHUN 2014  
TENTANG  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
SELATAN.

BAGAN ALUR FLOW CHART

KEGIATAN	SKPD	DPPKAD/PPKD	TAPD	SEKDA	KDH	DPRD	Gubernur	Mutu Baku		
								Kelengkapan Dokumen Hasil Musrembang	Waktu Akhir Bulan Mei	Output Dokumen RKPD
TAPD menyusun RKPD			<pre> graph TD     1((1)) --&gt; Mulai([Mulai])     Mulai --&gt; RKPD[RKPD]           </pre>							
TAPD menyusun rancangan awal KUA. Rancangan Awal KUA tersebut memuat: - Pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan Pusat-Daerah - Prinsip dan kebijakan penyusunan APBD - Teknis penyusunan APBD Hal-hal khusus lainnya			<pre> graph TD     RKPD[RKPD] --&gt; RAKUA[Rancangan Awal KUA]     RAKUA --&gt; 7[7]           </pre>					Dokumen RKPD	Minggu ke I Bulan Juni	Dokumen Rancangan Awal KUA

4

TAPD menyampaikan rancangan awal KUA kepada SEKDA.				<div><div>7</div><div>Rancangan Awal KUA</div></div>				Dokumen Rancangan Awal KUA	Minggu Ke I Bulan Juni	Dokumen Rancangan KUA
SEKDA menyetujui rancangan awal KUA dan menyerahkan rancangan KUA kpd KDH paling lambat awal Juni.			<div><div>Rancangan Awal KUA</div><div>Tidak</div><div>Sesuai</div><div>Ya</div><div>Rancangan KUA</div></div> <div><div>Rancangan Awal KUA</div><div>Koreksi Perbaikan</div><div>Rancangan Awal KUA</div></div>					Dokumen Rancangan Awal KUA	Minggu Ke I Bulan Juni	Dokumen Rancangan KUA
KDH melakukan pengesahan rancangan KUA dan menyerahkan kepada DPRD paling lambat pertengahan Juni.				<div><div>Rancangan KUA</div><div>Otorisasi</div><div>Rancangan KUA yang sudah disahkan KDH</div></div>				Dokumen Rancangan KUA	Pertengahan Bulan Juni	Dokumen Rancangan KUA yang sudah disahkan oleh KDH
				<div>8</div>						

7

DPRD membahas rancangan KUA bersama PEMDA untuk menghasilkan KUA dan Nota Kesepakatan KUA. KUA disepakati paling lambat minggu ke-1 Juli						<pre>graph TD     6[6] --&gt; A[Rancangan KUA yang sudah disahkan KDH]     A --&gt; B[Nota Kesepakatan KUA]     B --&gt; C[KUA]</pre>	Rancangan KUA yang sudah disahkan KDH	Minggu ke I Bulan Juli	1. Nota Kesepakatan KUA; 2. KUA
Berdasarkan KUA dan Nota Kesepakatan KUA, TAPD menyusun rancangan awal PPAS Tahapan PPAS: - Menentukan skala prioritas urusan; - Menentukan urutan program tiap urusan; - Menyusun plafon anggaran sementara tiap program.			<pre>graph TD     A[Nota Kesepakatan KUA] --&gt; B[KUA]     B --&gt; C[Rancangan Awal PPAS]</pre>				1. Nota Kesepakatan KUA; 2. KUA	Minggu ke I Bulan Juli	1. Rancangan Awal PPAS
TAPD menyampaikan rancangan awal PPAS kepada SEKDA.			<pre>graph TD     A[Rancangan Awal PPAS] --&gt; B{Sesuai}     B -- Ya --&gt; C[Rancangan PPAS]     B -- Tidak --&gt; D[Koreksi Perbaikan]     D --&gt; E[Rancangan Awal PPAS]     E --&gt; A</pre>				Rancangan Awal PPAS	Minggu ke II Bulan Juli	Rancangan Awal PPAS
SEKDA menyetujui rancangan awal PPAS menjadi Rancangan PPAS dan menyerahkan rancangan PPAS kepada KDH					<pre>graph TD     8[8] --&gt; A[Rancangan PPAS]</pre>	Dokumen Rancangan PPAS	Minggu Ke II Bulan Juli	Rancangan Awal PPAS yang sudah disahkan oleh Sekda	

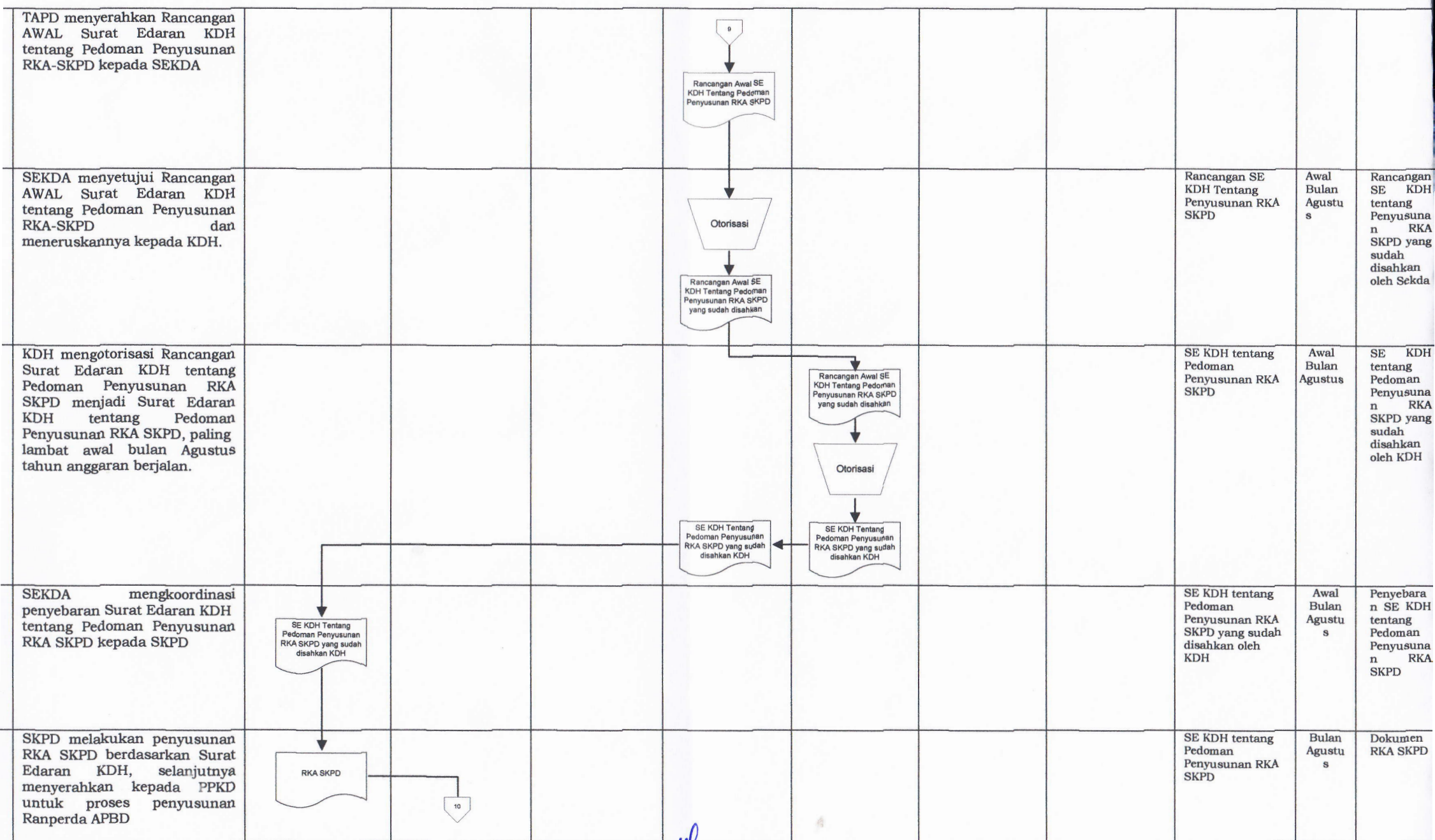
7

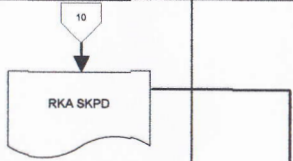
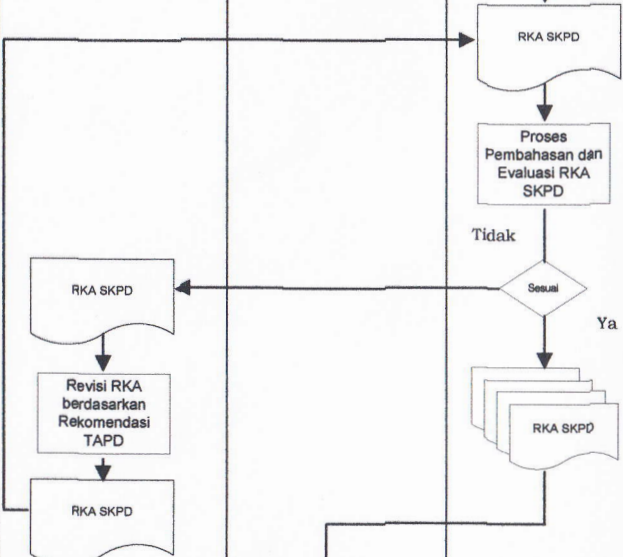
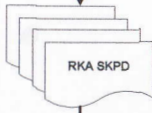
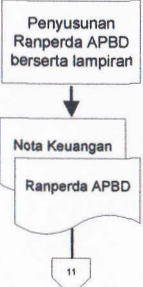
DPRD membahas rancangan KUA bersama PEMDA untuk menghasilkan KUA dan Nota Kesepakatan KUA. KUA disepakati paling lambat minggu ke-1 Juli						<pre> graph TD     A[6] --&gt; B[Rancangan KUA yang sudah disahkan KDH]     B --&gt; C[Nota Kesepakatan KUA]     C --&gt; D[KUA]           </pre>	Rancangan KUA yang sudah disahkan KDH	Minggu ke I Bulan Juli	1. Nota Kesepakatan KUA; 2. KUA
Berdasarkan KUA dan Nota Kesepakatan KUA, TAPD menyusun rancangan awal PPAS Tahapan PPAS: - Menentukan skala prioritas urusan; - Menentukan urutan program tiap urusan; - Menyusun plafon anggaran sementara tiap program.			<pre> graph TD     A[Nota Kesepakatan KUA] --&gt; B[KUA]     B --&gt; C[Rancangan Awal PPAS]           </pre>				1. Nota Kesepakatan KUA; 2. KUA	Minggu ke I Bulan Juli	1. Rancangan Awal PPAS
TAPD menyampaikan rancangan awal PPAS kepada SEKDA.			<pre> graph TD     A[Rancangan Awal PPAS] --&gt; B{Sesuai}     B -- Ya --&gt; C[Rancangan PPAS]     B -- Tidak --&gt; D[Koreksi Perbaikan]     D --&gt; E[Rancangan Awal PPAS]     E --&gt; A           </pre>				Rancangan Awal PPAS	Minggu ke II Bulan Juli	Rancangan Awal PPAS
SEKDA menyetujui rancangan awal PPAS menjadi Rancangan PPAS dan menyerahkan rancangan PPAS kepada KDH					<pre> graph TD     A[6] --&gt; B[Rancangan PPAS]           </pre>		Dokumen Rancangan PPAS	Minggu Ke II Bulan Juli	Rancangan Awal PPAS yang sudah disahkan oleh Sekda

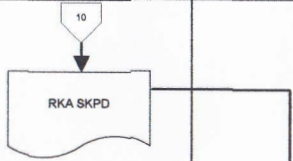
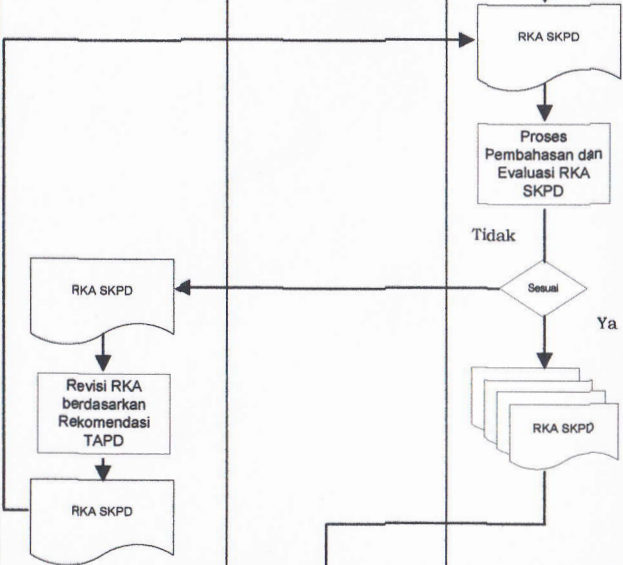

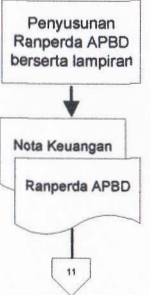
7

KDH mengesahkan rancangan PPAS dan menyerahkan kepada DPRD paling lambat minggu ke-2 Juli					8 Otorisasi		Dokumen Rancangan PPAS	Minggu Ke II Bulan Juli	Rancangan PPAS yang sudah disahkan oleh KDH
DPRD membahas rancangan PPAS bersama PEMDA untuk menghasilkan PPA dan Nota Kesepakatan PPA. Kedua dokumen ini disepakati paling lambat akhir Juli						Nota Kesepakatan PPAS PPAS	Dokumen Rancangan PPAS	Akhir Bulan Juli	Nota Kesepakatan PPA
Sebagai langkah awal penyusunan Raperda APBD, TAPD menyiapkan Rancangan AWAL Surat Edaran (SE) KDH tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD. Penyusunan Pedoman tersebut mengacu pada KUA dan PPA yang telah disepakati serta dokumen-dokumen pendukung lain seperti Analisis Standar Belanja, SPM, dan Standar Satuan Harga, Rancangan Awal SE KDH ini mencakup: 1. PPA untuk tiap program SKPD dan rencana pendapatan dan pembiayaan; 2. Sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD dengan kinerja SKPD sesuai dengan SPM; 3. Batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD 4. Hal-hal lain yang perlu mendapat perhatian dari SKPD 5. Lampiran: - KUA - PPA - Kode Rekening APBD - Format RKA-SKPD - Analisis Standar Belanja - Standar Satuan Harga			Rancangan Awal SE KDH Tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD				Dokumen Rancangan Awal SE KDH tentang Penyusunan RKA SKPD	Minggu Ke I Bulan Agust s	SE KDH tentang Penyusunan RKA SKPD

7



PPKD menerima RKA SKPD untuk memulai penyusunan Ranperda APBD							Dokumen RKA SKPD	Bulan Agustus	Dokumen RKA SKPD yang akan dibahas
PPKD menyerahkan RKA-SKPD kepada TAPD untuk dilakukan pembahasan. <i>Pembahasan dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan KUA, PPA, prakiraan, dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, SAB, standar harga, SPM, serta sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD. Apabila hasil pembahasan RKA-SKPD terdapat ketidaksesuaian, SKPD harus melakukan penyempurnaan.</i>							Dokumen RKA SKPD	Bulan Agustus s/d September	Dokumen RKA SKPD yang sudah dibahas oleh TAPD dan sudah selesai direvisi
TAPD menyerahkan RKA-SKPD yang telah sesuai kepada PPKD untuk dikompilasi menjadi Raperda APBD							Dokumen RKA SKPD	Bulan September	Ranperda APBD
Dengan data tambahan berupa Laporan Keuangan dan Daftar Pegawai, PPKD melakukan kompilasi atas RKA-SKPD menjadi Raperda APBD beserta lampiran dan Nota Keuangan. Lampiran APBD : - Ringkasan APBD - Ringkasan APBD (urusan dan organisasi) - Rekapitulasi belanja - Daftar jumlah pegawai, piutang daerah, dan investasi daerah							Dokumen Ranperda APBD beserta lampirannya	Bulan September	Dokumen Ranperda APBD bersama Nota Keuangan dan Lampiran

PPKD menerima RKA SKPD untuk memulai penyusunan Ranperda APBD							Dokumen RKA SKPD	Bulan Agustus	Dokumen RKA SKPD yang akan dibahas
PPKD menyerahkan RKA-SKPD kepada TAPD untuk dilakukan pembahasan. <i>Pembahasan dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan KUA, PPA, prakiraan, dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, SAB, standar harga, SPM, serta sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD. Apabila hasil pembahasan RKA-SKPD terdapat ketidaksesuaian, SKPD harus melakukan penyempurnaan.</i>							Dokumen RKA SKPD	Bulan Agustus s/d September	Dokumen RKA SKPD yang sudah dibahas oleh TAPD dan sudah selesai direvisi
TAPD menyerahkan RKA-SKPD yang telah sesuai kepada PPKD untuk dikompilasi menjadi Raperda APBD							Dokumen RKA SKPD	Bulan September	Ranperda APBD
Dengan data tambahan berupa Laporan Keuangan dan Daftar Pegawai, PPKD melakukan kompilasi atas RKA-SKPD menjadi Raperda APBD beserta lampiran dan Nota Keuangan. Lampiran APBD : - Ringkasan APBD - Ringkasan APBD (urusan dan organisasi) - Rekapitulasi belanja - Daftar jumlah pegawai, piutang daerah, dan investasi daerah							Dokumen Ranperda APBD beserta lampirannya	Bulan September	Dokumen Ranperda APBD bersama Nota Keuangan dan Lampiran

Daftar perkiraan penambahan/pengurangan aset tetap dan aset lain-lain Daftar kegiatan dianggarkan kembali Daftar dana cadangan daerah dan pinjaman daerah										
PKD menyerahkan Raperda PBD beserta lampiran dan Nota Keuangan kepada SEKDA								Dokumen Raperda APBD bersama Nota Keuangan dan Lampiran	Bulan September	Dokumen Raperda APBD bersama Nota Keuangan dan Lampiran yang akan disosialisasikan
EKDA menyerahkan Raperda PBD beserta lampiran dan Nota Keuangan kepada KDH dengan sebelumnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat								Dokumen Raperda APBD bersama Nota Keuangan dan Lampiran	Bulan September	Sosialisasi Raperda APBD
KDH menyerahkan Raperda PBD beserta lampiran dan Nota Keuangan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Oktober.								Dokumen Raperda APBD bersama Nota Keuangan dan Lampiran	Minggu ke I Bulan Oktober	Penyampaian Raperda APBD oleh KDH kepada DPRD
DPRD bersama PEMDA membahas kesesuaian Raperda PBD beserta lampiran dan Nota Keuangan dengan KUA dan PPAS.								1. Dokumen Raperda APBD dan Lampiran 2. Nota Keuangan 3. KUA 4. PPA	Bulan Oktober atau paling lama 3 bulan	Dokumen Raperda APBD yang sudah dibahas bersama antara KDH dengan DPRD

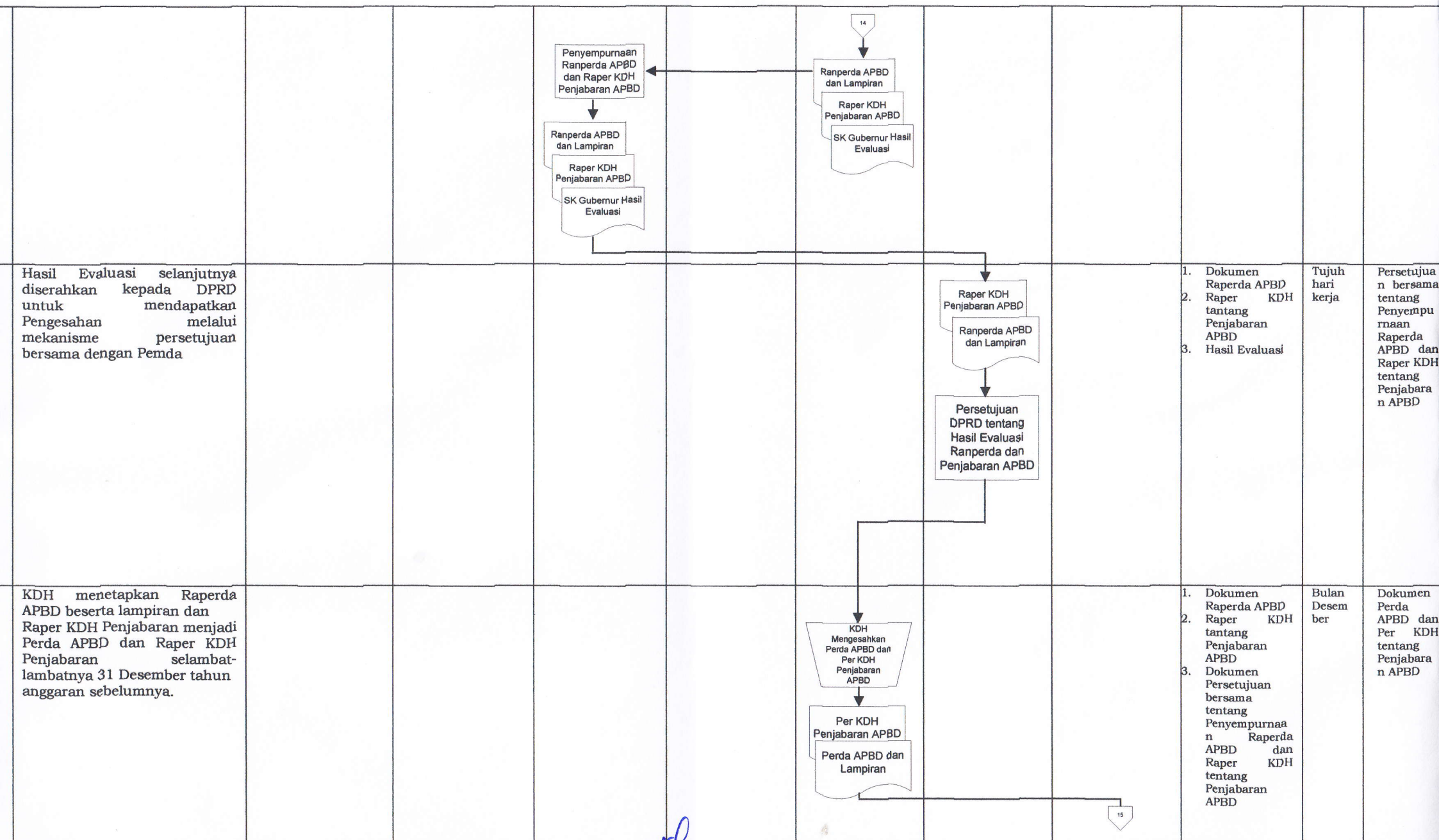
11

Setelah dinyatakan sesuai DPRD dan KDH membuat Persetujuan Bersama Raperda APBD selambat-lambatnya 1 bulan sebelum tahun anggaran bersangkutan dilaksanakan. Jika lebih dari 1 bulan DPRD tidak mengambil keputusan maka proses langsung dilanjutkan ke penyusunan Raper KDH APBD.						12 Persetujuan Bersama Ranperda APBD dan Lampiran	1. Dokumen Raperda APBD dan Lampiran 2. Nota Keuangan 3. KUA 4. PPA	Bulan Novem ber	Dokumen Raperda APBD yang telah disepakati bersama oleh KDH dengan DPRD
DPRD menyerahkan Persetujuan Bersama Raperda APBD kepada PPKD.		Persetujuan Bersama Ranperda APBD				Ranperda APBD dan Lampiran	Dokumen persetujuan bersama	Bulan Novem ber	Dokumen persetujuan bersama diserahkan pada PPKD
PPKD, berdasarkan Persetujuan Bersama Raperda APBD dan RKA-SKPD, menyiapkan Raper KDH Penjabaran APBD. Lampiran Raper KDH Penjabaran APBD : - Ringkasan penjabaran anggaran pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah - Penjabaran KDH menurut urusan, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, pembiayaan		Raper KDH Penjabaran APBD					1. Dokumen Raperda APBD 2. RKA SKPD 3. Dokumen Persetujuan Bersama	Bulan Novem ber	Dokumen Raper KDH tentang Penjabaran APBD
PPKD menyerahkan Raper KDH Penjabaran APBD kepada KDH.					Raper KDH Penjabaran APBD		Dokumen Raper KDH tentang Penjabaran APBD	Bulan Novem ber	Penyerahan Dokumen Raper KDH tentang Penjabaran APBD
KDH menyerahkan Raperda APBD beserta lampiran dan Raper KDH Penjabaran APBD kepada Gubernur paling lambat <b>3 hari kerja</b> setelah disetujui. Penyampaian Raperda dan Raper KDH disertai :						13	1. Dokumen Raperda APBD; 2. Dokumen Raper KDH tentang Penjabaran APBD 3. Dokumen persetujuan	Tiga hari kerja setelah persetujuan bersama	Penyerahan Dokumen Raperda APBD dan Per KDH tentang Penjabaran APBD

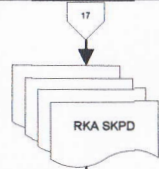
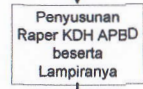
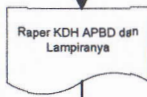
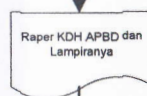
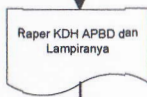
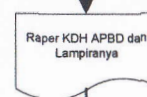
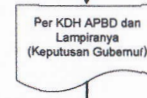

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persetujuan bersama PEMDA - DPRD terhadap Raperda APBD;</li> <li>- KUA dan PPA yang disepakati KDH dan pimpinan DPRD;</li> <li>- Risalah sidang jalannya pembahasan Raperda APBD;</li> <li>- Nota Keuangan dan pidato kepala daerah perihal penyampaian pengantar nota keuangan pada sidang DPRD</li> </ul>						<div data-bbox="1400 151 1444 183">13</div> <div data-bbox="1646 263 1803 406"> Raper KDH Penjabaran APBD  Ranperda APBD dan Lampiran </div>	4. bersama; KUA 5. PPA 6. Risalah Sidang 7. Nota Keuangan		beserta lampiran ya kepada Gubernur untuk dievaluasi
<p>Gubernur mengevaluasi kesesuaian Raperda APBD beserta lampiran dan Raper KDH Penjabaran APBD dengan Permendagri tentang Evaluasi Raperda melalui Tim Evaluasi Provinsi dengan koordinator BPK-BMD Provinsi .</p> <p>Jika Raperda APBD tidak dapat diterima dalam proses evaluasi, Pemda &amp; DPRD harus melakukan penyempurnaan dalam jangka waktu 7 hari</p>						<div data-bbox="1646 550 1803 646">Evaluasi Ranperda APBD dan Raper KDH Penjabaran APBD</div> <div data-bbox="1646 678 1803 774">SK Gubernur Hasil Evaluasi</div> <div data-bbox="1646 805 1803 933"> Raper KDH Penjabaran APBD  Ranperda APBD dan Lampiran </div>	1. Dokumen Raperda APBD; 2. Dokumen Raper KDH tentang Penjabaran APBD 3. Dokumen persetujuan bersama; 4. KUA 5. PPA 6. Risalah Sidang 7. Nota Keuangan	Lima belas hari kerja	SK Gubernur tentang Hasil Evaluasi Raperda APBD dan Raper KDH tentang Penjabaran APBD
<p>Gubernur menyerahkan Hasil Evaluasi kepada KDH untuk dilakukan penyempurnaan selanjutnya KDH mendelegasikan kepada TAPD melakukan Penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD</p>						<div data-bbox="1444 1141 1601 1316"> Ranperda APBD dan Lampiran  Raper KDH Penjabaran APBD  SK Gubernur Hasil Evaluasi </div>	SK Gubernur tentang Hasil Evaluasi Raperda APBD dan Raper KDH tentang Penjabaran APBD	Tujuh hari kerja	Dokumen Raperda APBD dan Raper KDH tentang Penjabaran APBD yang sudah disesuaikan dengan Hasil Evaluasi

7


Setelah dinyatakan sesuai DPRD dan KDH membuat Persetujuan Bersama Raperda APBD selambat-lambatnya 1 bulan sebelum tahun anggaran bersangkutan dilaksanakan. Jika lebih dari 1 bulan DPRD tidak mengambil keputusan maka proses langsung dilanjutkan ke penyusunan Raper KDH APBD.						12 Persetujuan Bersama Ranperda APBD dan Lampiran	1. Dokumen Raperda APBD dan Lampiran 2. Nota Keuangan 3. KUA 4. PPA	Bulan Novem ber	Dokumen Raperda APBD yang telah disepakati bersama oleh KDH dengan DPRD
DPRD menyerahkan Persetujuan Bersama Raperda APBD kepada PPKD.		Persetujuan Bersama Ranperda APBD				Ranperda APBD dan Lampiran	Dokumen persetujuan bersama	Bulan Novem ber	Dokumen persetujuan bersama diserahkan pada PPKD
PPKD, berdasarkan Persetujuan Bersama Raperda APBD dan RKA-SKPD, menyiapkan Raper KDH Penjabaran APBD. Lampiran Raper KDH Penjabaran APBD : - Ringkasan penjabaran anggaran pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah - Penjabaran KDH menurut urusan, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, pembiayaan		Raper KDH Penjabaran APBD					1. Dokumen Raperda APBD 2. RKA SKPD 3. Dokumen Persetujuan Bersama	Bulan Novem ber	Dokumen Raper KDH tentang Penjabaran APBD
PPKD menyerahkan Raper KDH Penjabaran APBD kepada KDH.					Raper KDH Penjabaran APBD		Dokumen Raper KDH tentang Penjabaran APBD	Bulan Novem ber	Penyerahan Dokumen Raper KDH tentang Penjabaran APBD
KDH menyerahkan Raperda APBD beserta lampiran dan Raper KDH Penjabaran APBD kepada Gubernur paling lambat 3 hari kerja setelah disetujui. Penyampaian Raperda dan Raper KDH disertai :						13	1. Dokumen Raperda APBD; 2. Dokumen Raper KDH tentang Penjabaran APBD 3. Dokumen persetujuan	Tiga hari kerja setelah persetujuan bersama	Penyerahan Dokumen Raperda APBD dan Raper KDH tentang Penjabaran APBD

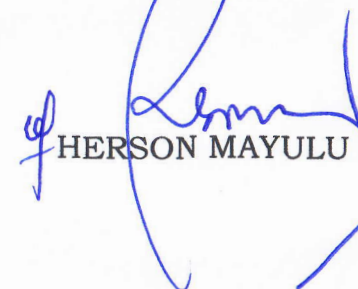


KDH menyerahkan Perda APBD dan Per KDH Penjabaran kepada Gubernur selambat-lambatnya 7 hari setelah ditetapkan.							<pre>graph TD; 15[15] --&gt; B1[Per KDH Penjabaran APBD Perda APBD dan Lampiran]; B1 --&gt; E1([Selesai]);</pre>	1. Dokumen Perda APBD; 2. Dokumen Per KDH tentang Penjabaran APBD	Tujuh hari kerja setelah ditetapkan	Penyampaian Dokumen Perda APBD dan Per KDH tentang Penjabaran APBD kepada Gubernur
Apabila hasil evaluasi Raperda APBD dan Raper KDH Penjabaran APBD tidak ditindaklanjuti oleh KDH dan DPRD maka Gubernur membatalkan Perda APBD dan Per KDH Penjabaran APBD							<pre>graph TD; 2((2)) --&gt; E2([Mulai]); E2 --&gt; B2[Raper KDH Penjabaran APBD Ranperda APBD dan Lampiran]; B2 --&gt; B3[Pembatalan Ranperda APBD dan Per KDH Penjabaran APBD];</pre>	1. Dokumen Raperda APBD; 2. Dokumen Raper KDH tentang Penjabaran APBD	Bulan desember	Dokumen Raperda APBD dan Per KDH tentang penjabaran APBD tidak ditindaklanjuti KDH dan DPRD
Gubernur mengeluarkan dokumen Keputusan Gubernur Pembatalan Perda dan Per KDH, dan Berlakunya Pagu Tahun Sebelumnya.							<pre>graph TD; B3 --&gt; B4[Peraturan Gubernur tentang Pembatalan Perda dan Per KDH Penjabaran APBD dan berlakunya Pagu tahun sebelumnya];</pre>	1. Dokumen Raperda APBD; 2. Dokumen Raper KDH tentang Penjabaran APBD	Bulan Desember	Surat Keputusan Gubernur tentang Pembatalan Perda APBD dan Per KDH tentang Penjabaran APBD
Gubernur menyerahkan dokumen Keputusan Gubernur Pembatalan Perda dan Per KDH, dan Berlakunya Pagu Tahun Sebelumnya kepada KDH.						<pre>graph TD; B4 --&gt; 16[16];</pre>	Surat Keputusan Gubernur tentang Pembatalan Perda APBD dan Per KDH tentang Penjabaran APBD	Bulan Desember	Per KDH Pelaksanaan Pengeluaran Pagu Tahun Sebelumnya	

TAPD menyerahkan RKA SKPD yang telah dibahas kepada PPKD								Dokumen SKPD	RKA	Satu hari kerja	Penyerahan Dokumen RKA SKPD
PPKD menyusun Raperda APBD beserta lampiran. Lampiran APBD : - Ringkasan APBD; - Ringkasan APBD (urusan dan organisasi); - Rekapitulasi belanja; - Daftar jumlah pegawai, piutang daerah, dan investasi daerah; - Daftar perkiraan penambahan/pengurangan aset tetap dan aset lain-lain; - Daftar kegiatan dianggarkan kembali; - Daftar dana cadangan daerah dan pinjaman Daerah.		 						Dokumen SKPD	RKA	Lima belas hari kerja	Dokumen Raperda APBD beserta lampirannya
PPKD menyerahkan Raperda APBD beserta lampiran kepada SEKDA								Dokumen APBD beserta lampirannya	Raperda	Satu hari kerja	PPKD menyerahkan Dokumen Raper APBD
SEKDA menyerahkan Raperda APBD beserta lampiran kepada KDH.								Dokumen APBD beserta lampirannya	Raperda	Tiga hari kerja	Penyerahan Dokumen Raperda APBD kepada KDH
KDH menyerahkan Raper KDH APBD dan lampiran kepada Gubernur, paling lambat 15 hari kerja sejak DPRD tidak menetapkan Keputusan Bersama KDH.								Dokumen APBD beserta lampirannya	Raperda	Lima belas hari kerja	Penyerahan Dokumen Raperda APBD kepada Gubernur
Gubernur mengesahkan Raper KDH APBD menjadi Per KDH APBD. Pengesahan harus sudah dilakukan dalam 30 hari kerja. Apabila pengesahan melewati batas waktu 30 hari kerja, maka KDH menetapkan Raper KDH APBD menjadi Per KDH APBD (Keputusan KDH).								Dokumen APBD beserta lampirannya	Raperda	Maksimal tiga puluh hari kerja	Pengesahan Raperda APBD oleh Gubernur
											

Gubernur menyerahkan Per KDH APBD (Keputusan Gubernur) kepada KDH.					<pre> graph TD     15[15] --&gt; A[Per KDH APBD dan Lampirannya (Keputusan Gubernur)]     A --&gt; B([Selesai])           </pre>			Per KDH APBD beserta lampirannya (Keputusan Gubernur)	Maksimal tiga puluh hari kerja	Gubernur menyerahkan Per KDH APBD kepada KDH
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--------------------------------	--


 BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

  
 HERSON MAYULU

TAPD menyampaikan rancangan awal KUA kepada SEKDA.				<div><div>7</div><div>Rancangan Awal KUA</div></div>				Dokumen Rancangan Awal KUA	Minggu Ke I Bulan Juni	Dokumen Rancangan KUA
SEKDA menyetujui rancangan awal KUA dan menyerahkan rancangan KUA kpd KDH paling lambat awal Juni.			<div><div>Rancangan Awal KUA</div><div>Tidak</div><div>Sesuai</div><div>Ya</div><div>Rancangan KUA</div></div> <div><div>Rancangan Awal KUA</div><div>Koreksi Perbaikan</div><div>Rancangan Awal KUA</div></div>					Dokumen Rancangan Awal KUA	Minggu Ke I Bulan Juni	Dokumen Rancangan KUA
KDH melakukan pengesahan rancangan KUA dan menyerahkan kepada DPRD paling lambat pertengahan Juni.				<div><div>Rancangan KUA</div><div>Otorisasi</div><div>Rancangan KUA yang sudah disahkan KDH</div></div> <div>8</div>				Dokumen Rancangan KUA	Pertengahan Bulan Juni	Dokumen Rancangan KUA yang sudah disahkan oleh KDH

7